

2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BONE

RENCANA KERJA **(RENJA) 2022**

Jl. Macanang, Tanete
Riattang Barat



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna baik dari penyajiannya maupun cakupan informasi yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada penyusunan yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi Badan Kesbangpol baik dalam merumuskan kegiatan maupun dalam menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi.

Bone, 2022

BAB I

PENDAHULUAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD	12
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	15
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah	32
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol Kab Bone	34
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV : PENUTUP	36
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut: Rencana Kerja --- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone 2021 ; a. Berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah ;

c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD ; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah ; e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone merupakan penjabaran dari program yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra). Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone. Tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone beserta sasaran satuan kerja lain, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bone. Sehingga tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bone dan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Bone.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone Tahun 2021 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bone yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2014 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan Badan KesbangdanPolitk di Kabupaten Bone dalam kurun waktu satu tahun;
2. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan Komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Bone.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, keterkaitan antara Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJABADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun – tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan / atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain : Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan;

1. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut
4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah beserta nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BAGSA DAN POLITK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone adalah penjabaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone pada Tahun 2020 ditetapkan 8 (delapan) program dan 27 (dua puluh Tujuh) kegiatan urusan wajib. Terkait dengan hal tersebut Rencana KerjaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone selama tahun 2020. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2020

Anggaran Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Bone dengan APBD (murni) sebesar Rp 4.950.000.000,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp 3.813.908.000,- terdiri dari 8 Program dan 27 Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,5% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99,43%.

NO	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
				KEUANGAN	%
		BELANJA LANGSUNG	3,813,908,000.00	3,792,032,642.00	99.43
I	119.11901.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	568,625,300.00	563,122,483.00	99.03
1	119.11901.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20,000,000.00	16,563,953.00	82.82
	5.2.2.	Belanja Barang danJasa	20,000,000.00	16,563,953.00	82.82
	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	20,000,000.00	16,563,953.00	82.82
2	119.11901.01.03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00
	5.2.2.	Belanja Barang danJasa	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00
	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor dan Peralatan Elektronik Lainnya	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00
3	119.11901.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	157,310,400.00	155,278,530.00	98.71
	5.2.2.	Belanja Barang danJasa	157,310,400.00	155,278,530.00	98.71
	5.2.2.3.01.07	Honorarium Bulanan	28,800,000.00	28,800,000.00	100.00
	5.2.2.3.03.21	Belanja Jasa/Upah Kerja	123,600,000.00	123,600,000.00	100.00
	5.2.2.04.03	Belanja Premi / Asuransi Ketenagakerjaan	4,910,400.00	2,878,530.00	58.62
4	119.11901.01.15	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20,000,000.00	19,990,000.00	99.95
	5.2.2.	Belanja Barang danJasa	20,000,000.00	19,990,000.00	99.95
	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20,000,000.00	19,990,000.00	99.95
5	119.11901.01.23	RAPAT-RAPATKORDINASIDAN KONSULTASIDALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH	172,424,900.00	172,400,000.00	99.99
	5.2.2.	Belanja Barang danJasa	172,424,900.00	172,400,000.00	99.99
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98,424,900.00	98,400,000.00	99.97
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74,000,000.00	74,000,000.00	100.00
6	119.11901.01.24	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	190,090,000.00	190,090,000.00	100.00
	5.2.2.	Belanja Barang danJasa	190,090,000.00	190,090,000.00	100.00
	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84,490,000.00	84,490,000.00	100.00
	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4,620,000.00	4,620,000.00	100.00
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25,250,000.00	25,250,000.00	100.00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25,500,000.00	25,500,000.00	100.00
	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	50,230,000.00	50,230,000.00	100.00
II	119.11901.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	63,971,260.00	58,800,965.00	91.92
7	119.11901.02.24	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	63,971,260.00	58,800,965.00	91.92
	5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63,971,260.00	58,800,965.00	91.92
	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	63,971,260.00	58,800,965.00	91.92
	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30,971,260.00	30,683,195.00	99.07
	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8,000,000.00	3,117,770.00	38.97
III	119.11901.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	11,600,000.00	11,600,000.00	100.00
8	119.11901.05.01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	11,600,000.00	11,600,000.00	100.00
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,600,000.00	11,600,000.00	100.00
	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	11,600,000.00	11,600,000.00	100.00
IV	119.11901.08	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM	18,819,200.00	18,800,000.00	99.90
9	119.11901.08.01	PENYUSUNAN RENCANA PERANGKAT DAERAH	18,819,200.00	18,800,000.00	99.90
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,819,200.00	18,800,000.00	99.90
	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	500,000.00	100.00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,519,200.00	2,500,000.00	99.24
V	119.11901.18	PROGRAMKEMITRAANPENGEMBANGANWAWASANKEBANGSAAN	224,525,000.00	224,400,000.00	99.94
10	119.11901.18.04	PENINGKATAN KAPASITAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN	49,500,000.00	49,500,000.00	100.00
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49,500,000.00	49,500,000.00	100.00
	5.2.2.03.21	Belanja Jasa/Upah Kerja	28,500,000.00	28,500,000.00	100.00
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
		PENINGKATAN KAPASITASFORUMKERUKUNAN UMATBERAGAMA (FKUB)	150,025,000.00	149,900,000.00	99.92
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150,025,000.00	149,900,000.00	99.92
	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	14,125,000.00	14,125,000.00	100.00
	5.2.2.03.21	Belanja Jasa/Upah Kerja	27,600,000.00	27,600,000.00	100.00
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	4,925,000.00	98.50
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00

	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32,000,000.00	32,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,500,000.00	28,450,000.00	99.82
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,500,000.00	17,500,000.00	100.00
	5.2.2.30.04	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	20,300,000.00	20,300,000.00	100.00
12	119.11901.18.09	PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
13	119.11901.18.10	PENANAMAN NILAI-NILAI REVOLUSIONAL BAGI ASN KABUPATEN BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
VI	119.11901.21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	186,850,000.00	185,833,000.00	99.46
14	119.11901.21.01	PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT	31,250,000.00	31,250,000.00	100.00
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,250,000.00	31,250,000.00	100.00
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	500,000.00	500,000.00	100.00
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250,000.00	250,000.00	100.00
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500,000.00	500,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
15	119.11901.21.09	PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI BANTUAN PARTAI POLITIK	74,950,000.00	74,040,000.00	98.79
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74,950,000.00	74,040,000.00	98.79
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	500,000.00	500,000.00	100.00
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000.00	750,000.00	100.00
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	9,150,000.00	91.50
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23,700,000.00	23,640,000.00	99.75
	5.2.2.30.04	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
16	119.11901.21.17	PENINGKATAN KAPASITAS LSM DAN ORMAS	55,650,000.00	55,610,000.00	99.93
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55,650,000.00	55,610,000.00	99.93
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000.00	1,480,000.00	98.67
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,150,000.00	22,150,000.00	100.00
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,000,000.00	17,980,000.00	99.89
17	119.11901.21.18	PEMANTAUAN PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH	25,000,000.00	24,933,000.00	99.73
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000.00	24,933,000.00	99.73
	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	500,000.00	500,000.00	100.00
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000.00	750,000.00	100.00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000.00	748,000.00	99.73
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,000,000.00	1,995,000.00	99.75
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,250,000.00	14,200,000.00	99.65
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,750,000.00	1,740,000.00	99.43
VII	119.11901.25	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KESADARAN BELA NEGARA	63,700,000.00	63,539,900.00	99.75
18	119.11901.25.01	PELATIHAN BELA NEGARA	23,000,000.00	22,840,000.00	99.30
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,000,000.00	22,840,000.00	99.30
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00	14,840,000.00	98.93
19	119.11901.25.02	PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH	40,100,000.00	40,099,900.00	100.00
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40,100,000.00	40,099,900.00	100.00
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00	2,999,900.00	100.00
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,200,000.00	17,200,000.00	100.00
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
20	119.11901.25.03	PENDIDIKAN KESADARAN BELA NEGARA	600,000.00	600,000.00	100.00
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600,000.00	600,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600,000.00	600,000.00	100.00
VII	119.11901.32	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	2,675,817,240.00	2,665,936,294.00	99.63
21	119.11901.32.01	PENYEDIA TENAGA PENGENDALI KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	512,000,000.00	511,998,500.00	100.00
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	512,000,000.00	511,998,500.00	100.00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	438,000,000.00	438,000,000.00	100.00
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00	2,998,500.00	99.95
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37,000,000.00	37,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00
22	119.11901.32.03	RAKOR POLKAM TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN	304,795,000.00	304,580,900.00	99.93
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	304,795,000.00	304,580,900.00	99.93
	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	185,575,000.00	185,500,000.00	99.96
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,120,000.00	1,120,000.00	100.00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,750,000.00	5,750,000.00	100.00
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36,000,000.00	36,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,700,000.00	17,700,000.00	100.00
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,000,000.00	20,860,900.00	99.34
	5.2.2.30.04	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	35,900,000.00	35,900,000.00	100.00
23	119.11901.32.04	PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KONFLIK SOSIAL	83,232,240.00	83,200,000.00	99.96
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83,232,240.00	83,200,000.00	99.96
	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	875,000.00	875,000.00	100.00
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000.00	750,000.00	100.00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000.00	750,000.00	100.00
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,325,000.00	18,325,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,232,240.00	16,200,000.00	99.80
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
	5.2.2.30.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,300,000.00	11,300,000.00	100.00
24	119.11901.32.05	PENINGKATAN KERJASAMA DAN SINERGITAS	1,516,450,000.00	1,516,119,494.00	99.98
		DALAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS			
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,516,450,000.00	1,516,119,494.00	99.98
	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	50,000,000.00	49,719,494.00	99.44
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,750,000.00	3,750,000.00	100.00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128,700,000.00	128,700,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,000,000.00	34,950,000.00	99.86
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
	5.2.2.30.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,278,000,000.00	1,278,000,000.00	100.00
25	119.11901.32.06	SATGAS DAERAH SAPU BERSIH PUNGLI	132,340,000.00	128,337,500.00	96.98
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132,340,000.00	128,337,500.00	96.98
	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,700,000.00	1,697,500.00	99.85
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
	5.2.2.30.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62,700,000.00	58,700,000.00	93.62
26	119.11901.32.07	SATUAN TUGAS KONTRA TERORISME, KONTRA NARKOBA			
		SERTA GUGUS GERAKAN BONE MELAYANI TERTIB DAN BERSIH	42,000,000.00	39,499,900.00	94.05
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42,000,000.00	39,499,900.00	94.05
	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	2,500,000.00	0.00	0.00
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	999,900.00	99.99
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
27	119.11901.32.08	PENGAWASAN ORANG ASING	85,000,000.00	82,200,000.00	96.71
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85,000,000.00	82,200,000.00	96.71
	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga	22,500,000.00	19,700,000.00	87.56
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
		JUMLAH	3,813,908,000.00	3,792,032,642.00	99.43

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai sebagai indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. Disamping itu Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capainnya, sehingga akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone didasarkan pada *review* pencapaian sasaran strategis Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018, (Tabel TC.30) sebagai berikut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Bone

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Bakesbangpol Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun 2018-2023						Rasio Capaian Tahun 2018-2023					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif		☐	✓	25%	25%	47%	52%	57%	62%	25%	25%	47%	52%			100%	100%	100%	100%		
2	Cakupan orpol yang mendapatkan pembinaan		✓		80%	80%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
3	Cakupan Lembaga Keagamaan yang berperan aktif		✓		80%	80%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

4	Cakupan Aparatur dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara		✓		4,6	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6	4,6	5,6	0	0			100%	100%	0%	0%		
5	Cakupan Konflik bernuansa SARA yang tertangani		✓		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
6	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP		✓		CC	CC	B	B	BB	BB	CC	CC	B	B			C	B	B	B		

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategis yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan. Secara rinci, strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone diuraikan dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Adapun strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol
2. Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara
3. Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik

Permasalahan

Beberapa Permasalahan yang di hadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone sebagai berikut :

- ♦ Belum memadai sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan khususnya bagi anggota KOMINDA.
- ♦ Belum adanya wadah formal untuk pengembangan wawasan kebangsaan skala lokal.
- ♦ Terbatasnya kemampuan SDM sehingga pendidikan politik tidak merata.
- ♦ Masih terbatasnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan Bela Negara.

Dampak

- Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan adat ketimuran.
- Isu pemekaran wilayah, akan mengurangi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia terpecah.
- Isu terorisme yang terkait dengan masalah suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
- Konflik horizontal, terkait dengan penguasaan/kepemilikan lahan antara sebagian penduduk dengan perusahaan.

Tantangan dan Peluang

Tantangan

1. Masih perlunya ditingkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, DPD Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Pemilihan Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya.

2. Masih terdapat penyakit masyarakat (pekat) antara lain prostitusi, trafficking, penyalahgunaan narkoba, illegal logging, pengguna minuman keras(miras) dan penyakit masyarakat lainnya.
3. Belum optimalnya nilai-nilai budaya dan kebangsaan dalam rangka menghadapi globalisasi dan teknologi yang tidak terbendung.
4. Munculnya isu- isu terorisme, munculnya potensi konflik berbasis SARA dan tuntutan pemekaran wilayah.
5. Belum optimalnya peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
6. Belum optimalnya pendidikan politik, peran partai politik dalam menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat serta pengelolaan administrasi partai politik

Peluang

1. Perkembangan politik yang semakin demokratis, memberikan peluang kepada warga masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan, melalui LSM/ormas dan partisipasi masyarakat
2. Stabilitas keamanan dan politik dalam negeri yang kondusif membawa ketenteraman dalam masyarakat
3. Pendidikan Politik Masyarakat yang cukup baik, meningkat mendorong peningkatan minat masyarakat menjadi anggota legislatif

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel TC – 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec . TR Barat	JumlahnRekening Jasa Komunikasi Telpn / Wifi	3 Unit	35,110,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec . TR Barat	JumlahnRekening Jasa Komunikasi Telpn / Wifi	3 Unit	35,110,000	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpeliharah	40 Unit	17,300,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpeliharah	40 Unit	17,300,000	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec . TR Barat	Jumlah Tenaga Administrasi Yang Mendapatkan Jasa Keuangan selama Satu Tahun	37 Orang	133,027,200	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec . TR Barat	Jumlah Tenaga Administrasi Yang Mendapatkan Jasa Keuangan selama Satu Tahun	33 Orang	203,227,200	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec . TR Barat	Jumlah Pembayaran Media Yang Menyediakan Bahan Bacaan	10 Surat Kabar	20,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec . TR Barat	Jumlah Pembayaran Media Yang Menyediakan Bahan Bacaan	15 Surat Kabar	20,000,000	
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Diikuti	28 PNS	150,000,000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Diikuti	28 PNS	150,000,000	
6	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec . TR Barat	Jumlah Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	64 Aparat	260,363,300	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec . TR Barat	Jumlah Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	64 Aparat	260,363,300	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Realisasai Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Realisasai Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		-	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	2 Unit	30,000,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	9 Unit	180,000,000	
2	Pengadaan Mebeleur	Kec . TR	Jumlah Pengadaan Mabeleur	38 Buah	84,550,000	Pengadaan Mebeleur	Kec . TR	Jumlah Pengadaan Mabeleur	79 Buah	159,000,000	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

		Barat					Barat				
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	6 Ruangan		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	6 Ruangan	200,000,000	
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kec . TR Barat	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	17 Unit	76,582,260	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kec . TR Barat	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	17 Unit	100,000,000	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec . TR Barat	Jumlah Aparat Yang Mengikuti Diklat PIM	4 PNS	60,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec . TR Barat	Jumlah Aparat Yang Mengikuti Diklat PIM	4 PNS	60,000,000	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		-	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Realisasi Capaian Kinerja Yang Tersusun	5 Dokumen	8,000,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Realisasi Capaian Kinerja Yang Tersusun	5 Dokumen	8,000,000	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun Yang Tersusun	1 Dokumen		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun Yang Tersusun		3,000,000	
3	Penyusunan Laporan Semesteran	Kec . TR Barat	Jumlah laporan Keuangan Semesteran Yang Tersusun	2 Dokumen		Penyusunan Laporan Semesteran	Kec . TR Barat	Jumlah laporan Keuangan Semesteran Yang Tersusun		5,000,000	
V	Program Penunjang Pemerintahan Umum		Cakupan realisasi Penunjang Pemerintahan Umum (%)			Program Penunjang Pemerintahan Umum		Cakupan realisasi Penunjang Pemerintahan Umum (%)		-	
1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Yang Tersusun	7 Dokumen	25,300,000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Yang Tersusun	7 Dokumen	25,300,000	
VI	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Presentase Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Melalui Forum Pembauran Kebangsaan (%)			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Presentase Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Melalui Forum Pembauran Kebangsaan (%)		-	
1	Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Kec . TR Barat	Jumlah Rapat Koordinasi Etnis Yang Tergabung Dalam Forum Pembauran Kebangsaan	15 Etnis	59,000,000	Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Kec . TR Barat	Jumlah Rapat Koordinasi Etnis Yang Tergabung Dalam Forum Pembauran Kebangsaan	15 Etnis	75,000,000	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

2	Peningkatan Kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kec . TR Barat	Jumlah Rakor Anggota Yang Tergabung Dalam Forum Kerukunan Umat Beragama	19 Orang	64,600,000	Peningkatan Kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kec . TR Barat	Jumlah Rakor Anggota Yang Tergabung Dalam Forum Kerukunan Umat Beragama	19 Orang	85,000,000	
3	Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Yang Terbina	1 Lembaga		Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Yang Terbina	1 Lembaga	150,000,000	
4	Penanaman Nilai-Nilai Revolusi Mental Bagi ASN Kabupaten Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera	Kec . TR Barat	Jumlah PD Yang Terlibat Didalam Kegiatan Revolusi Mental	4 SKPD		Penanaman Nilai-Nilai Revolusi Mental Bagi ASN Kabupaten Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera	Kec . TR Barat	Jumlah PD Yang Terlibat Didalam Kegiatan Revolusi Mental	4 SKPD	150,000,000	
VII	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Persentase Ormas dan Orpol Yang Mendapatkan Pembinaan (%)			Program Pendidikan Politik Masyarakat		Persentase Ormas dan Orpol Yang Mendapatkan Pembinaan (%)			
1	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Kec . TR Barat	Jumlah Peserta Penyuluhan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	2700 Orang	469,575,000	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Kec . TR Barat	Jumlah Peserta Penyuluhan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	350 Orang	180,000,000	
2	Pemantauan dan Pengawasan Administrasi Bantuan Partai Politik	Kec . TR Barat	Jumlah Bantuan Anggaran Parpol Dalam Setahun	45 Kursi	22,313,000	Pemantauan dan Pengawasan Administrasi Bantuan Partai Politik	Kec . TR Barat	Jumlah Bantuan Anggaran Parpol Dalam Setahun	12 Parpol	70,500,000	
3	Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Untuk Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	27 Kecamatan	310,490,000	Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Untuk Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	27 Kecamatan	75,000,000	
4	Peningkatan Kapasitas LSM dan Ormas	Kec . TR Barat	Jumlah LSM dan Ormas Yang Terdaftar	50 Orang 20 SKT	53,370,000	Peningkatan Kapasitas LSM dan Ormas	Kec . TR Barat	Jumlah LSM dan Ormas Yang Terdaftar	27 Kecamatan	78,170,000	
VIII	Program Perlindungan Masyarakat dan Kesadaran Bela Negara		Presentase Keikutsertaan Aparata dan Masyarakat Dalam Bela Negara (%)			Program Perlindungan Masyarakat dan Kesadaran Bela Negara		Presentase Keikutsertaan Aparata dan Masyarakat Dalam Bela Negara (%)		-	
1	Pelatihan Bela Negara	Kec . TR Barat	Jumlah Peserta Pelatihan Bela Negara Yang Terlatih	100 Orang	449,887,000	Pelatihan Bela Negara	Kec . TR Barat	Jumlah Peserta Pelatihan Bela Negara Yang Terlatih	100 Orang	476,847,000	
2	Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pemantauan Ketahana Ekonomi Daerah	6 Laporan	19,700,000	Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pemantauan Ketahana Ekonomi Daerah	6 Laporan	29,700,000	
3	Pendidikan Kesadaran Bela Negara	Kec . TR Barat	Jumlah Peserta Pendidikan Bela Negara	300 Orang		Pendidikan Kesadaran Bela Negara	Kec . TR Barat	Jumlah Peserta Pendidikan Bela Negara	250 Oramg	95,000,000	
IX	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (%)			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (%)		-	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

1	Penyiapan Tenaga Pengendali Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kec . TR Barat	Jumlah Rakor Tenaga Pengendali Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	14 Orang	272,000,000	Penyiapan Tenaga Pengendali Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kec . TR Barat	Jumlah Rakor Tenaga Pengendali Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	27 Kecamatan	567,000,000	
2	Peningkatan Kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Kec . TR Barat	Jumlah Pelaksanaan Forum Kewaspadaan dini Masyarakat	5 Orang	81,200,000	Peningkatan Kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Kec . TR Barat	Jumlah Pelaksanaan Forum Kewaspadaan dini Masyarakat	-	-	
3	Rakor Polkam Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	Kec . TR Barat	Jumlah Rakor Polkam Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	4 Kali	443,200,000	Rakor Polkam Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	Kec . TR Barat	Jumlah Rakor Polkam Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	4 Kali	450,400,000	
4	Penanganan Gangguan Kemanan dan Konflik Sosial	Kec . TR Barat	Jumlah Simulasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Konflik Sosial yang Terlaksana	27 Kecamatan	569,232,240	Penanganan Gangguan Kemanan dan Konflik Sosial	Kec . TR Barat	Jumlah Simulasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Konflik Sosial yang Terlaksana	27 Kecamatan	569,232,240	
5	Peningkatan Kerjasama dan Sinergitas Dalam Pemeliharaan Kantrantibmas	Kec . TR Barat	Jumlah Rakor Kerjasama dan Sinergitas Antar FORKOPIMDA	6 Instansi	1,598,000,000	Peningkatan Kerjasama dan Sinergitas Dalam Pemeliharaan Kantrantibmas	Kec . TR Barat	Jumlah Rakor Kerjasama dan Sinergitas Antar FORKOPIMDA	6 Istansi	1,598,000,000	
6	Satgas Daerah Sapu Bersih Pungli	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Hasil Satgas daerah sapu Bersih Pungli	27 Kecamatan	257,200,000	Satgas Daerah Sapu Bersih Pungli	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Hasil Satgas daerah sapu Bersih Pungli	27 Kecamatan	300,000,000	
7	Satuan Tugas Kontra Terorisme, Kontra Narkoba Serta Gugus Gerakan Bone Melayani, Tertib dan Bersih	Kec . TR Barat	Jumlah laporan Satuan Tugas Kontra Terorisme, Kontra Narkoba Serta Gugus Gerakan Bone Melayani, tertib, dan Bersih			Satuan Tugas Kontra Terorisme, Kontra Narkoba Serta Gugus Gerakan Bone Melayani, Tertib dan Bersih	Kec . TR Barat	Jumlah laporan Satuan Tugas Kontra Terorisme, Kontra Narkoba Serta Gugus Gerakan Bone Melayani, tertib, dan Bersih	27 Kecamatan	150,000,000	
8	Pengawasan Orang Asing	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Pengawasan Orang Asing			Pengawasan Orang Asing	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Pengawasan Orang Asing	27 Kecamatan	150,000,000	
JUMLAH					5,570,000,000					6,676,149,740	

2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bone belum secara langsung terlibat dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya selaku stakeholder pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholder eksternal untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yaitu Kebijakan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kemudian juga pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk didalamnya Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi.

Selain daripada itu juga terdapat program nasional yaitu dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kemudian pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara On-Line.

Hingga saat ini program dan kegiatan yang terkait kebijakan nasional tersebut belum terlaksana secara optimal. Kedua kebijakan dan program nasional tersebut di atas masih menjadi pekerjaan rumah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone yang perlu dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi Kab. Bone. Dalam pelaksanaannya, diperlukan komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Pemerintah Kab. Bone disertai dukungan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam penyelenggaraan setiap urusan Pemerintahan Daerah di Kab. Bone.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone memiliki Tujuan :

- Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan mengembangkan nilai - nilai kebangsaan
- Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

- Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif (%)
- Prosentase Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan
- Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif
- Prosentase Keikutsertaan Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara
- Prosentase Konflik sosial yang tertangani
- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Tabel 4.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023

NO	Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran
1	2	4
I	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan mengembangkan nilai - nilai kebangsaan	1. Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif (%) 2. Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif
II	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase Konflik Sosial yang tertangani
III	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk implementasikan program dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi misi Kabupaten Bone, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih menitik beratkan pada hal peningkatan ketertiban dan kenyamanan melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Kesadaran Bela Negara.

Adapun Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yang akan diselenggarakan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Program Utama

- 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Sera Budaya Politik
- 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Basional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program Penunjang

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada table berikut :

NO.	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Sera Budaya Politik	Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi politik
			Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi politik
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi politik
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi politik
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayan Ormas, Evaluasi dan Mendiasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
			Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

NO.	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusuna Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyedian Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyedian Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Tahun 2022 merencanakan 6 (Enam) Program serta 12 (Dua Belas) kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan perincinan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 5 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 Sub Kegiatan:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - 2) Pengadaan Mebel

- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahab Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pememrintahan Daerah, terdiri dari 3 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin lainnya
- 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan:**
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari 4 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 2) Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan Tekhnis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, terdiri dari 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan**
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, terdiri dari 5 Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik
- 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 1 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Program Kerja Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- 5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari 1 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan;

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari 2 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Program Kerja Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 2) Penyusunan Bahan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari 5 Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
- 6) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara lengkap, rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023, beserta kebutuhan dana indikatif dan sumbernya, dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.2

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**

SKPD : 8-01.0-0.0-0.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8									11.414.147.814,70				12.555.562.596,17
8	01								11.414.147.814,70				12.555.562.596,17
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.510.476.779,20				4.961.524.457,12
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.260.700,00				12.386.770,00
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Bakesbangpol yang Tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Dokumen	3.994.100	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	4.393.510
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Bakesbangpol Yang Tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	1.265.550	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.392.105
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Bakesbangpol Yang Tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	690.525	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	759.578
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Bakesbangpol Yang Tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	690.525	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	759.578

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan capaian KInerja Bakesbangpol Yang Tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	3 Dokumen	4.620.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.082.000
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.655.962.509			2.921.558.760
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Beseta Tambahan Penghasilan Bulanan ASN	Kec. Tanete Riattang Barat	14 Bulan	2.655.962.509	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 Bulan	2.921.558.760
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.500.000			55.550.000
8	01	01	2.05	05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Baju seragam (lembar)	Kec. Tanete Riattang Barat	57 lembar	28.500.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	57 lembar	31.350.000
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparat Yang Ikut Serta Dalam Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi Yang Diikuti oleh Aparat Pegawai	Kec. Tanete Riattang Barat	2 ASN	22.000.000	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	24.200.000
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				761.819.450			838.001.395
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai RFencana Kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	233.190.300	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	256.509.330
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Pegawai dan Tamu sesuai Rencana Kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	60.872.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	66.959.200

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	32.456.150	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	35.701.765
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana Kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	43.800.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	48.180.000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Bakesbangpol Dalam Kegiatan Rutin Pelaksanaan Koordinasi dan KONSultasi Dalam dan Luar Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	550 Kali	391.501.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		600 Kali	430.651.100
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				195.210.000,00				214.731.000,00
8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanete Riattang Barat	3 Unit	100.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110.000.000
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleu Kantor Sesuai Rencana Kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	40 Buah/set	47.960.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Buah/set	52.756.000
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	45 Unit/Set	47.250.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit/Set	51.975.000
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				432.412.200,00				475.653.420,00
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Telpon/Faximile, Internet, dan Tv) sesuai Rencana Kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	48 Rekening	33.000.000	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 Rekening	36.300.000

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Yang Dibayarkan Perbulan Untuk Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Bulan	399.412.200	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	439.353.420
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				403.311.920,00				443.643.112,00
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas Secara Rutin/Berkala Sesuai Rencana Kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	21 Unit	142.801.560	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Unit	157.081.716
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	25 Paket	142.801.560	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Paket	157.081.716
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Sesuai Rencana Kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Paket	117.708.800	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	129.479.680
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				604.241.550,00				664.665.705,00
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				604.241.550,00				664.665.705,00
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec. Tanete Riattang Barat	4 laporan	75.140.670	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	82.654.737

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	89.398.430	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	98.338.273
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	110.000.000	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	121.000.000
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	282.554.250	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	310.809.675
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	47.148.200	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	51.863.020
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.911.776.950,50				2.102.954.645,55

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.911.776.950,50				2.102.954.645,55
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kec. Tanete Riattang Barat	2 laporan	92.061.640,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	101.267.804
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	1.444.715.310,50	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	1.589.186.842
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	100.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	110.000.000

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	75.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	82.500.000
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	200.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	220.000.000
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				1.056.518.560,00				1.162.170.416,00
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				1.056.518.560,00				1.162.170.416,00
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja Koordinasi di Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	20 dokumen	50.000.000,00	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 dokumen	55.000.000

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 dokumen	45.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	49.500.000
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	35.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	38.500.000
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	55.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	60.500.000
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	871.518.560,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	958.670.416
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				469.791.975,00				516.771.172,50
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				469.791.975,00				516.771.172,50

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Program Kerja Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	57.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	62.700.000
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	150.000.000,00	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	165.000.000
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	50.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	55.000.000
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	4 laporan	188.949.475,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	207.844.423

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	4 laporan	23.842.500,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	26.226.750
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				2.861.342.000				3.147.476.200
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				2.861.342.000				3.147.476.200
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	8 laporan	274.230.000	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 laporan	301.653.000
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	14 laporan	370.106.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 laporan	407.116.600

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	2 laporan	275.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	302.500.000
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	2 laporan	123.816.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	136.197.600
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitor, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah		27 laporan	122.386.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 laporan	134.624.600
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	16 laporan	1.695.804.000	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 laporan	1.865.384.400

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone, berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022, secara sinergitas dan terintegrasi. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Bidang dan Sekretariat, Sub Bagian Perencanaan dan Program menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Tahun 2022.
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2022, Renja Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas ,harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2022, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian Keuangan.
4. Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Program, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan Renja Tahun 2022 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan.

5. Pada akhir tahun anggaran 2022, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2022, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Badan melalui Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan.
6. Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kegiatan perencanaan dan penyusunan Kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan indikator prosentase lembaga kemaanan yang berperan aktif dan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik memberikan kemudahan kepada Aparat keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam hal ini semua stacholder terkait dan para FORKOPIMDA dalam kegiatan penyiapan tenaga pengendali kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, ini merupakan dua kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022, dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan keamanan masyarakat dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Bone dalam menjaga NKRI.